

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH FUNGSI PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM,  
KEPADATAN PENDUDUK DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PULAU SUMATERA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

Oleh:

**DAHLIA**

NIM : 21108010114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH FUNGSI PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, KEPADATAN PENDUDUK DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PULAU SUMATERA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**Oleh:**

**DAHLIA**

**NIM : 21108010114**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SUNARYATI, S.E., M.Si.**

**NIP. 19751111 200212 2 002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-919/Un.02/DEB/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH BELANJA PEMERINTAH FUNGSI PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, KEPADATAN PENDUDUK, DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PULAU SUMATERA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAHLIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21108010114  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Sunaryati, SE., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6850e0f2dc275



Pengaji I  
Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 683fb580b7699



Pengaji II  
Anggari Marya Kresnowati, S.E., M.E.  
SIGNED

Valid ID: 68413c1404fd7



Yogyakarta, 21 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.  
SIGNED

Valid ID: 6850e4476698

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dahlia  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Dahlia  
NIM : 21108010114

Judul Skripsi : “**Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Pulau Sumatera”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 05 Mei 2025

Pembimbing



Dr. Sunaryati, S.E., M.Si.  
NIP. 19751111 200212 2 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

- Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dahlia  
NIM : 21108010114  
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Pulau Sumatera” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Mei 2025

Penyusun,



Dahlia

## **HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai salah satu civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahlia

NIM : 21108010114

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi/Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (non exclusive royalty free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Pulau Sumatera”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap tercantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal 05 Mei 2025

Yang menyatakan,



Dahlia

21108010114

## **HALAMAN MOTTO**

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain  
apa yang telah diusahakannya”

-(An-Najm : 39)-

“Teruslah melangkah meski perlahan, berjuanglah dengan kesabaran  
dan teguh keyakinan. Jangan biarkan kegagalan menghentikanmu,  
karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Setiap  
rintangan adalah batu loncatan, dan setiap air mata adalah bahan bakar  
semangat menuju puncak keberhasilan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, maka skripsi ini saya persembahkan untuk:

### **Orang Tua**

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Warja Wargana dan Ibu Nining Tarsini yang senantiasa memberikan dukungan, do'a serta usaha terbaik untuk anak-anaknya. Semoga Allah SWT selalu merahmati Bapak dan Ibu.

### **Guru dan Dosen**

Seluruh Guru dan Dosen penulis selama menempuh pendidikan, yang telah ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi dan nasihat sehingga bermanfaat bagi penulis dalam mengejar cita-cita.

### **Keluarga dan Sahabat**

Seluruh keluarga saya, adik, nenek, kakek, sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar dapat meraih cita-cita yang diharapkan.

### **Almamater**

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Dan yang terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai salah satu bentuk penghargaan dan hasil dari proses belajar yang akan terus berlanjut.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987/ dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘....	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَدَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

## C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جُزِيَّةٌ	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitrī
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

◦	Fathah	Ditulis	A
○	Kasrah	Ditulis	I
˙	Dammah	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جاھییۃ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسِیٰ	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	کَرِیمٰ	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُروضٰ	Ditulis	<i>Furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَیْنَمٰ	Ditulis	<i>Ai</i>
Fathah + wawu mati فُولٰ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati فُولٰ	Ditulis	<i>Au</i>
Fathah + wawu mati فُولٰ	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti dengan *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf 1 (el)

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Pulau Sumatera” dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah. Dalam penyusunan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, seluruh proses penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., PH.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.SI., AK., CA., ACPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sunaryati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
5. Ibu Riswanti Budi Sekaringsih, M.Sc. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan berlangsung.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teristimewa keluarga penulis terutama Bapak Warja dan Ibu Tarsini serta adik kandung penulis Evan Ardiansyah yang senantiasa berjuang tanpa lelah dalam mendoakan yang terbaik, memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan penuh agar selalu bisa memberikan yang terbaik dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan.
9. Sahabat dan teman seperjuangan penulis: Iqna Sulistya Ningsih, Miftachul Ilmia Wachdah, Wiwit Lutfiana, dan Latifatul Mufidah yang telah memberikan semangat, masukan, dan motivasi agar terus berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Terima kasih atas waktu dan kenangan berharga selama perkuliahan ini, kalian luar biasa.
10. Mbak Putri Salsabila dan Septi Tri Kharnaesa yang senantiasa sabar, menyemangati penulis dan selalu meluangkan waktunya membantu penulis selama berada di perantauan ini.
11. Teman-teman Ponpes Modern Al-Ikhlas Putri yang senantiasa memberikan dukungan, dan do'a yang tulus untuk kesuksesan penulis.
12. Teman-teman seperjuangan, seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2021 yang telah bersama-sama penulis dalam menempuh perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan dalam program KKN 114 Dusun Bibis yang telah memberikan rasa persaudaraan, segala perhatian, dorongan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat merasakan keluarga baru di dunia perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati, penuh ketulusan hati, penulis panjatkan do'a semoga budi baik dan segala bantuan yang telah penulis terima menjadi ibadah disisi-Nya serta mendapat pahala yang dilipatgandakan oleh Allah SWT.

15. Terima kasih kepada diri saya sendiri atas tekad, kerja keras, kesabaran, dan dedikasi yang tak pernah pudar sampai titik ini dan berusaha untuk melewati tantangan yang ada. Sebuah pencapaian besar yang patut diapresiasi karena berhasil melewati satu tangga menuju proses pendewasaan.

Akhir kata, semoga bantuan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini menjadi berkah dan amal saleh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang memerlukan, Amiin.

Yogyakarta, 20 April 2025

Penyusun,



Dahlia

21108010114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Landasan Teori.....	16
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	16
2. Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan .....	21
3. Upah Minimum .....	26
4. Kepadatan Penduduk.....	30
5. Kemiskinan .....	32
B. Telaah Pustaka .....	36
C. Pengembangan Hipotesis.....	45
D. Kerangka Pemikiran.....	52

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Objek Penelitian .....	53
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	54
D. Definisi Operasional Variabel.....	54
E. Metode Analisis .....	56
1. Estimasi Data panel .....	57
2. Pemilihan Model Estimasi.....	58
3. Uji asumsi klasik .....	61
4. Uji Hipotesis .....	64
<b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Statistika Deskriptif.....	67
B. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	69
C. Pengujian Asumsi Klasik.....	73
1. Uji Normalitas .....	73
2. Uji Multikolinearitas .....	74
3. Uji Heteroskedastisitas .....	75
4. Uji Autokorelasi .....	76
D. Pengujian Hipotesis.....	77
1. Uji Parsial.....	77
2. Uji F-Simultan.....	80
3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	81
E. Pembahasan .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Perbandingan Luas Wilayah dan Kontribusi terhadap PDB Nasional Menurut Pulau di Indonesia .....	3
Tabel 1. 2 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Di Pulau Sumatera (Miliar) ....	5
Tabel 1. 3 Upah Minimum Pulau Sumatera (Rp) .....	7
Tabel 1. 4 Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (%) .....	10
Tabel 2. 1 Ringkasan Literatur.....	40
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	55
Tabel 4. 1 Analisis Statistika Deskriptif .....	67
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	70
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman .....	71
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	72
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	75
Tabel 4. 7 Nilai Durbin-Watson.....	76
Tabel 4. 8 Hasil Random Effect Model .....	78
Tabel 4. 9 Nilai F-Statistic .....	80
Tabel 4. 10 Hasil Koefisien Determinasi .....	82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 .....	4
Gambar 1. 2 Rata-rata Kepadatan Penduduk Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Jiwa/km <sup>2</sup> ) .....	8
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	73
Gambar 4. 2 Hasil Uji Autokorelasi.....	76



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Data Penelitian.....	99
Lampiran 2: Analisis Statistik Deskriptif.....	101
Lampiran 3: Pemilihan Model Estimasi.....	102
Lampiran 4: Asumsi Klasik .....	103
Lampiran 5: Pengujian Hipotesis .....	105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **ABSTRAK**

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan penduduk dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Penelitian ini menggunakan data sekunder pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera rentan waktu 2019-2023. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upah minimum dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IPM di Pulau Sumatera.

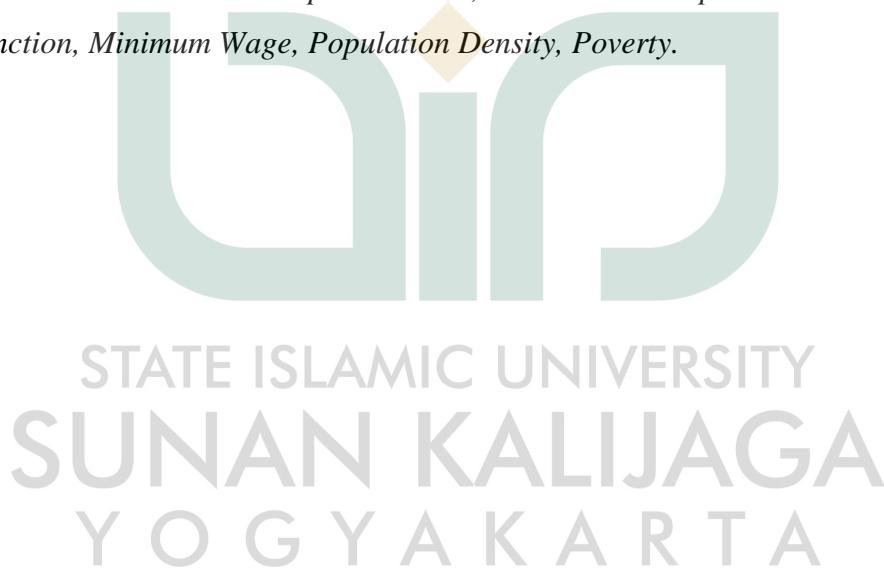
**Kata kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk, Kemiskinan.



## **ABSTRACT**

*The main goal of development is to improve the quality of life of the people, which can be measured through the Human Development Index as an indicator of the success of a region's development. This study aims to examine how the influence of government expenditure on education function, minimum wage, population density and poverty rates affect the Human Development Index (HDI) in Sumatra Island. The analysis method used is panel data regression with the Random Effect Model (REM) approach. This study uses secondary data from 10 provinces in Sumatra Island over the period of 2019-2023. From the research results, it can be concluded that minimum wage and population density have a positive and significant effect on HDI, while government expenditure on education function and poverty have a negative and significant effect on HDI in Sumatra Island.*

**Keywords:** *Human Development Index, Government Expenditure on Education Function, Minimum Wage, Population Density, Poverty.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pencapaian pembangunan suatu negara bukan hanya bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas serta produktif yang berdampak besar dalam mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi (Ardiningrum et al., 2021). Kualitas manusia menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Manusia berperan sebagai objek serta subjek dalam pembangunan yang memajukan negara. Peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan harus fokus pada distribusi kebutuhan pokok secara adil, peningkatan standar hidup, dan akses terhadap kegiatan ekonomi serta sosial (Sangkereng et al., 2019).

Pada tahun 1990 *United Nation Development Programme* (UNDP) memperkenalkan konsep untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dan kemudian disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini menilai pencapaian kesejahteraan manusia melalui tiga komponen dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan aspek ekonomi. Kemudian, UNDP (2004) menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) bukan hanya dipandang

sebagai target akhir, melainkan menjadi proses berkelanjutan yang mencakup empat faktor penting, yaitu keadilan, produktivitas, pemberdayaan, serta keberlanjutan (Komariah et al., 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu alat ukur guna menilai kemajuan suatu wilayah dalam memperbaiki taraf hidup penduduknya, serta menjadi acuan dalam menilai kemajuan suatu negara. Untuk menjadikan negara maju, fokusnya bukan hanya pada peningkatan ekonomi tetapi juga memperhatikan pembangunan manusia secara menyeluruh (Todaro & Smith, 2006). Badan Pusat Statistik (2019) menyatakan bahwa pembangunan manusia mencakup dua aspek yang saling melengkapi, yaitu pengembangan kapabilitas manusia melalui upaya meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, serta pemanfaatan kapabilitas tersebut dalam aktivitas produktif dan sosial. (Hidayat & Woyanti, 2021).

Indonesia memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai IPM mencapai angka 71,92 kemudian terus meningkat hingga tahun 2023 yang berada pada angka 73,55. Setiap tahun perkembangan IPM Indonesia terus menunjukkan tren positif, dengan rata-rata kenaikan 0,51% per tahun. Akan tetapi, kenaikan IPM di Indonesia belum diiringi dengan pemerataan tingkat IPM antar provinsi di Indonesia. Masih terdapat perbedaan signifikan tingkat IPM di 34 provinsi di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Dari kacamata ekonomi, Indonesia mempunyai wilayah strategis yang berperan sebagai pusat penggerak perekonomian nasional selayaknya jantung yang menghidupkan perekonomian

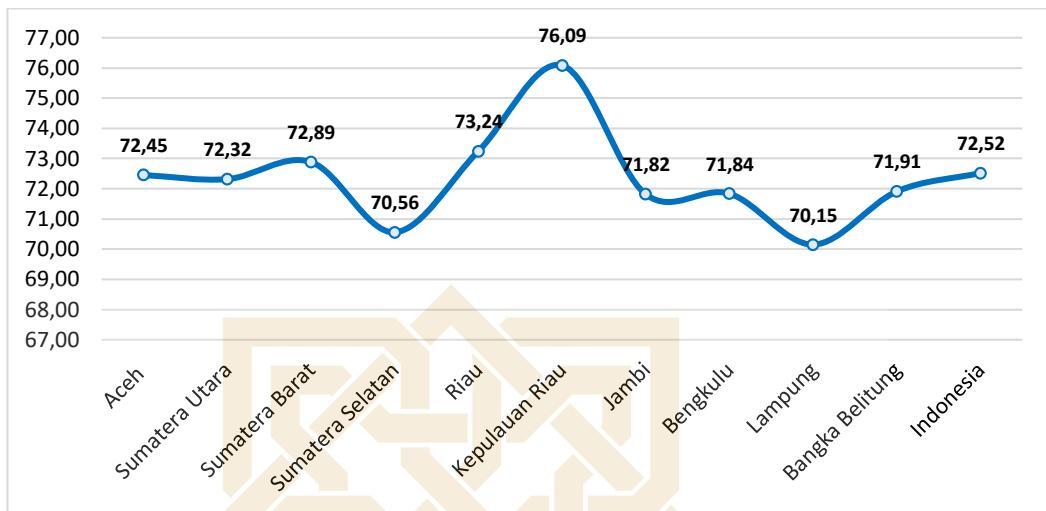
negara. Pulau Sumatera merupakan pusat ekonomi Indonesia kedua setelah pulau jawa, yang memberi kontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Fajar & Nurfalah, 2020).

**Tabel 1. 1 Perbandingan Luas Wilayah dan Kontribusi terhadap PDB Nasional Menurut Pulau di Indonesia**

No.	Nama Pulau	Luas (km <sup>2</sup> )	Kontribusi terhadap GDP
1	Papua	786.000 km <sup>2</sup>	6,94%
2	Kalimantan	743.330 km <sup>2</sup>	5,43%
3	Sumatra	473.481 km <sup>2</sup>	22,01%
4	Sulawesi	174.416 km <sup>2</sup>	6,37%
5	Jawa	128.297 km <sup>2</sup>	57,05%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Berdasarkan data dari BPS Pulau Sumatera sebagai pulau terbesar ketiga di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan, yang terdiri dari 10 provinsi dengan luas 473.481 km<sup>2</sup> atau 24,6% dari luas seluruh wilayah di Indonesia dan dihuni oleh 59,97 juta jiwa pada tahun 2023. Dengan kekayaan sumber daya alam serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan IPM. Namun, pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera masih menghadapi tantangan. Hal tersebut tercermin dari perbedaan tingkat IPM antar provinsi di Pulau Sumatera, dimana beberapa provinsi memiliki nilai IPM yang berada di bawah rata-rata nasional.



**Gambar 1. 1 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sumatera Tahun 2019-2023**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)*

Berdasarkan data dari BPS untuk rata-rata IPM pada seluruh provinsi di Pulau Sumatera terus meningkat selama periode 2019-2023. Secara keseluruhan provinsi di Pulau Sumatera termasuk kedalam kategori IPM tinggi dengan indeks diatas 70, namun masih di bawah tingkat IPM nasional dengan indeks 72,52. Apabila dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional, hanya beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki IPM di atas angka rata-rata nasional dengan indeks rata-rata 72,52 yaitu Sumatera Barat dengan indeks 72,89, Riau sebesar 73,24, dan Kepulauan Riau sebesar 76,09, sementara provinsi lainnya berada di bawah tingkat IPM Indonesia. Adanya perbedaan indeks IPM antar provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak lepas dari peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Melalui kebijakan anggaran yang ditetapkan, pemerintah dapat mengalokasikan pengeluaran untuk membiayai

berbagai sektor publik yang berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua sektor utama yang sering menjadi prioritas dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Investasi pada kedua sektor tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas manusia, sehingga tidak hanya meningkatkan IPM tetapi juga membantu menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang (Mahendra, 2020).

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pendidikan sebesar 20% dari total APBN atau APBD sesuai yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang layak. Selain itu, pemerintah juga wajib memastikan ketersediaan dana yang cukup guna mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Mahfuzat et al., 2024).

**Tabel 1. 2 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Di Pulau Sumatera (Miliar)**

Provinsi	Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	4.387,08	3.909,95	4.193,48	3.506,79	3.986,62
Sumatera Utara	5.784,90	6.253,45	6.233,34	5.353,73	3.475,19
Sumatera Barat	3.185,36	3.029,42	3.030,71	2.162,66	2.159,84
Sumatera Selatan	3.024,48	3.293,58	3.361,67	2.463,12	3.109,78
Riau	3.071,28	3.345,64	2.405,27	2.137,63	2.487,43
Kepulauan Riau	1.043,95	1.031,11	1.232,80	832,07	942,53
Jambi	1.653,98	1.681,74	1.688,98	1.223,04	1.017,00
Bengkulu	1.070,75	1.152,61	872,13	885,57	913,39
Lampung	2.757,06	3.003,29	2.927,97	1.746,32	1.760,34
Bangka Belitung	832,04	994,13	820,82	594,98	876,25

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2024

Berdasarkan data di atas, alokasi belanja pemerintah fungsi pendidikan di Pulau Sumatera antar provinsi memiliki realisasi yang berbeda disesuaikan dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Provinsi dengan alokasi belanja pemerintah fungsi pendidikan tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.253,45 Miliar pada tahun 2019, sementara Provinsi Bangka Belitung memiliki alokasi belanja pemerintah fungsi pendidikan terendah dengan nominal Rp. 594,98 Miliar tahun 2020.

Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh besaran penghasilan yang diperoleh. Upah menjadi sumber utama pendapatan bagi masyarakat. Ketika penghasilan meningkat, kesejahteraan masyarakat akan turut membaik, dan sebaliknya jika upah menurun berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan (Ningrum, 2017). Menurut Sukirno (2003) upah adalah kompensasi yang diterima pekerja sebagai imbalan atas partisipasi atas kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Bagi perusahaan, upah berperan penting karena besarnya upah yang dibayarkan kepada karyawan dapat memengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Tujuan pemberian upah ini untuk mempertahankan karyawan, menjaga semangat kerja, dan memastikan kelangsungan perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perkembangan upah minimum setiap tahunnya akan mempengaruhi peningkatan pendapatan. Keadaan tersebut menyebabkan kemampuan pekerja dalam meningkatkan konsumsi belanjanya dan terjadilah peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, artinya perkembangan upah minimum terbukti mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia (Rosyadah, 2021).

Kebijakan penetapan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menjamin penghasilan buruh, kebijakan ini juga diharapkan menjadi alat untuk mendistribusikan pembangunan secara merata di setiap daerah (Faizin, 2021).

**Tabel 1. 3 Upah Minimum Pulau Sumatera (Rp)**

Provinsi	UMP				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	2.916.810	3.165.031	3.165.031	3.166.460	3.413.666
Sumatera Utara	2.303.403	2.499.423	2.499.423	2.522.610	2.710.493
Sumatera Barat	2.289.228	2.484.041	2.484.041	2.512.539	2.742.467
Sumatera Selatan	2.804.453	3.043.111	3.144.446	3.144.446	3.404.177
Riau	2.662.026	2.888.564	2.888.563	2.938.564	3.191.662
Kepulauan Riau	2.769.754	3.005.460	3.005.460	3.050.172	3.279.194
Jambi	2.243.718	2.630.162	2.630.162	2.698.940	2.943.033
Bengkulu	2.213.604	2.213.604	2.215.000	2.238.094	2.418.280
Lampung	2.241.270	2.432.002	2.432.002	2.440.486	2.633.285
Bangka Belitung	2.976.705	3.230.024	3.230.024	3.264.881	3.498.479

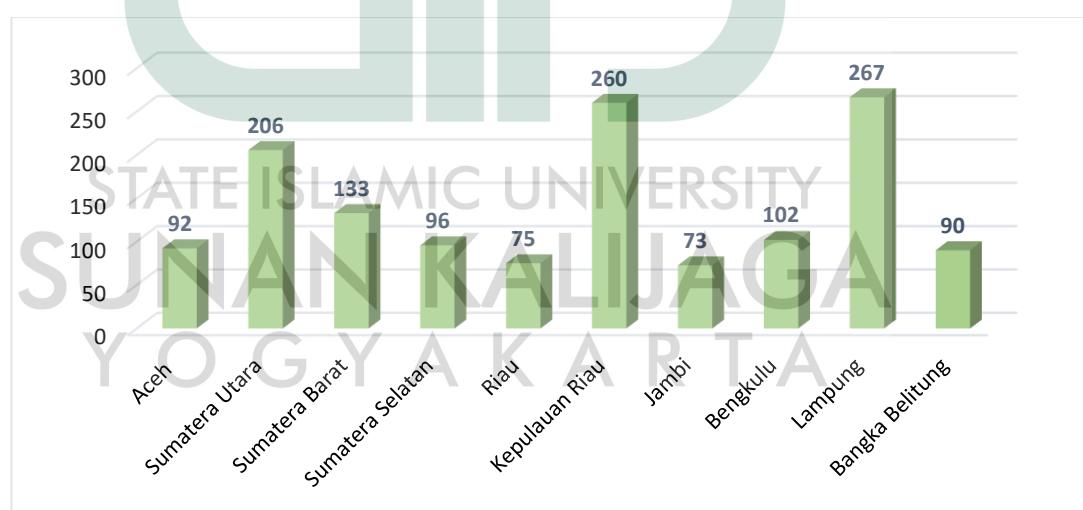
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Dilihat dari data di atas, perkembangan upah minimum di Pulau Sumatera menunjukkan kenaikan yang konsisten hampir di semua provinsi. Provinsi dengan upah minimum terbesar yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan nominal Rp. 3.498.479,- pada tahun 2023 sementara Provinsi Bengkulu memiliki upah minimum terendah dengan nominal Rp. 2.213.604,- pada tahun 2019. Ketidakmerataan upah minimum menggambarkan perbedaan kondisi ekonomi dan industri yang tidak merata di masing-masing provinsi, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja.

Perbedaan upah minimum antar daerah memicu peningkatan kepadatan penduduk, terutama di wilayah dengan tingkat upah lebih besar dibandingkan

tempat asal. Harapan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui penghasilan yang lebih tinggi mendorong adanya urbanisasi, yaitu peralihan penduduk ke wilayah perkotaan. Arus migrasi ini mengakibatkan tingginya kepadatan penduduk yang akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya, kesehatan, pendidikan, dan penghasilan penduduk yang dapat menurunkan indeks pembangunan manusia (Handoyo, 2023).

Kepadatan penduduk yang tinggi seringkali dianggap masalah, tetapi hal itu tidak selalu berdampak negatif pada indeks pembangunan manusia. Jika dikelola dengan baik, kepadatan penduduk dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas akses pasar, dan memperkaya keanekaragaman budaya. Dengan pengelolaan yang efektif, kepadatan penduduk dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sosial yang berkelanjutan (Handoyo, 2023).



**Gambar 1. 2 Rata-rata Kepadatan Penduduk Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Jiwa/km<sup>2</sup>)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)*

Gambar di atas menggambarkan rata-rata kepadatan penduduk pada seluruh provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023. Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan rata-rata kepadatan  $267 \text{ jiwa/km}^2$ , dan diikuti dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Utara dengan masing-masing rata-rata kepadatan  $260 \text{ jiwa/km}^2$  dan  $206 \text{ jiwa/km}^2$ . Sementara itu, Provinsi Jambi menjadi daerah dengan kepadatan terendah dengan rata-rata kepadatan  $73 \text{ jiwa/km}^2$  selama lima tahun terakhir.

Kepadatan penduduk yang tinggi sering kali memperburuk ketimpangan pendapatan sehingga menciptakan jurang kemiskinan yang semakin lebar. Populasi yang meningkat membuat sumber daya terbatas, mengakibatkan akses ekonomi dan layanan publik tidak merata, sehingga menyebabkan beberapa kelompok masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang sering kali terjadi hampir tak berujung dan menjadi akar dari berbagai masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Faizin, 2021).

Kemiskinan membawa dampak besar terhadap pembangunan manusia, sebab permasalahan ini bersifat kompleks dan berawal dari rendahnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya, keperluan penting lain seperti pendidikan dan kesehatan sering diabaikan. Situasi ini memperbesar kesenjangan antara pembangunan manusia dan kemiskinan, sehingga target Indeks Pembangunan Manusia yang dirancang pemerintah tidak terealisasikan secara maksimal (Hidayat & Woyanti, 2021).

**Tabel 1. 4 Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (%)**

Provinsi	Percentase Penduduk Miskin				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45
Sumatera Utara	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Sumatera Selatan	12,71	12,66	12,84	11,90	11,78
Riau	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68
Kepulauan Riau	5,80	6,13	5,75	6,03	5,69
Jambi	7,60	7,58	8,09	7,62	7,58
Bengkulu	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04
Lampung	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11
Bangka Belitung	4,62	4,53	4,90	4,45	4,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data dari BPS, setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki persentase penduduk miskin yang berbeda-beda. Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Aceh dengan persentase sebesar 145,33% pada tahun 2021 dan diikuti Provinsi Bengkulu dengan persentase 15,23% pada tahun 2019. Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan persentase 4,45% pada tahun 2022. Perbedaan tingkat kemiskinan antar provinsi ini menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta akses layanan dasar.

Beberapa penelitian sebelumnya ikut serta menunjang penelitian ini. Menurut hasil penelitian dari Rosyadah (2021) menyatakan bahwa upah minimum dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Sementara itu, dalam penelitian Hakim et al. (2024) memperoleh hasil bahwa belanja fungsi pendidikan dan kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap

IPM. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Siregar et al. (2023) yang mengungkapkan upah minimum tidak berpengaruh terhadap IPM, selanjutnya dalam penelitian Sangkereng et al. (2019) menyatakan kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap IPM, dan dalam Hauzan et al. (2021) yang menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, serta penelitian Hartono (2022) yang menyampaikan bahwa belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Sesuai dengan beberapa temuan dari peneliti sebelumnya, ditemukan berbagai inkonsistensi dalam hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menggambarkan pembaruan bagaimana faktor-faktor seperti belanja pemerintah fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan penduduk, dan kemiskinan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu penentuan lokasi penelitian dan data yang digunakan. Belum banyak penelitian yang serupa dengan penelitian ini yang berlokasi di Pulau Sumatera. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan variabel kepadatan penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi atas keragaman hasil penelitian yang terkait. Kemudian, data yang digunakan pada penelitian merupakan data terbaru mulai tahun 2019-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sesuai dengan penjabaran latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis tertarik mengulas kembali penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan faktor-faktor yang

mempengaruhinya yang berjudul “**Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Upah Minimum, Kepadatan Penduduk Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Pulau Sumatera**”.

## B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, fokus penelitian ini tertuju pada 5 (lima) rumusan masalah yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan diantaranya:

1. Apakah belanja pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera?
3. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera?
4. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sebelumnya telah dijabarkan, tujuan yang akan diperoleh pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera.
2. Pengaruh upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera.

3. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera.
4. Pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain hasil yang ingin diperoleh, diharapkan hasil penelitian akan memberi manfaat bagi para pembaca atau pihak yang merujuknya, di antaranya:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang lebih luas mengenai pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan penduduk, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Juga menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi pemerintah, diharapkan temuan dari penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, khususnya dalam mengarahkan program dan alokasi anggaran guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.
3. Bagi akademisi, hasil analisis ini dapat memperkaya wawasan terkait ekonomi pembangunan dan bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam analisis penelitian dengan topik sejenis.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan pemahaman yang lebih jelas terkait topik dan materi yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang menjelaskan alur pemikiran secara runtut dari awal hingga akhir. Berikut adalah uraiannya:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti, oleh karena itu poin penting pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang penelitian yang mencakup fenomena objek kajian dan data pendukung terkait. Kemudian berisi tentang rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, serta tujuan dan manfaat yang diperoleh dalam penelitian. Dan diakhiri dengan pemaparan mengenai sistematika penulisan untuk mendapatkan arah penelitian.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas konsep dan makna penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Bab ini juga menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang melandasi penelitian. Teori juga hasil penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga yang menerangkan tentang variabel serta metode yang diterapkan pada penelitian, oleh karena itu poin penting dalam bab ini meliputi

jenis penelitian, objek yang diteliti, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode yang digunakan, dan uji hipotesis.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi jawaban atas pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada bagian ini, dipaparkan hasil penelitian yang mencakup implementasi serta analisis deskriptif dari hasil olah data yang dilakukan.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk pihak terkait. Di samping itu, akan dibahas kekurangan dari penelitian ini agar dapat digunakan sebagai referensi untuk studi di masa mendatang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan penduduk, serta kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023 yang telah disajikan dalam Bab IV memperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera tahun 2019-2023. Ini berarti bahwa hipotesis pertama pada penelitian ditolak. Hasil ini mengartikan bahwa belanja pendidikan belum sepenuhnya efektif meningkatkan IPM, karena anggaran tersebut belum digunakan secara tepat dan belum merata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
- 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera tahun 2019-2023, maka hipotesis kedua dalam penelitian diterima. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan upah minimum berdampak baik pada peningkatan pendapatan masyarakat yang mempermudah akses terhadap pendidikan, kesehatan serta perekonomian, sehingga berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

- 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kepadatan penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera tahun 2019-2023, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk justru dapat mendorong peningkatan IPM, karena wilayah padat penduduk cenderung memiliki akses layanan publik dan infrastruktur yang lebih baik yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera tahun 2019-2023, maka hipotesis keempat dalam penelitian diterima. Hal ini berarti kemiskinan yang tinggi akan menurunkan produktivitas ekonomi suatu daerah karena kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Secara keseluruhan atau simultan, belanja pemerintah fungsi pendidikan, upah minimum, kepadatan penduduk, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Sumatera. Hal ini diketahui dari nilai *F-statistic* yang menunjukkan angka 0.0000 yang artinya lebih kecil dari signifikansi 5% atau 0,05.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun bagi peneliti-peneliti berikutnya. Adapun saran dari peneliti untuk pihak yang bersangkutan yaitu:

- 1) Bagi pemerintah, diperlukan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja sebagai investasi jangka panjang. Dengan penerapan strategi yang sesuai dapat memberi dampak positif pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas model penelitian, menambah variabel, serta meningkatkan cakupan data yang digunakan. Dengan begitu diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai variabel yang diteliti dan terus mengembangkan keterbaruan yang belum terdapat pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adon, M. J., & Jeraman, G. T. (2023). Kontribusi teori kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari Amartya Sen dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. *Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.22295>
- Ajijah, N., Budiman, M. H., & Sobariah, S. S. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 3, 1–8. <http://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/128>
- Ardiningrum, L. R., Junaidi, & Umiyati, E. (2021). Pengaruh indeks ketahanan pangan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(2), 59–68. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i2.13402>
- Astriani, A., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap IPM di Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2019. *Syntax Idea*, 3(7), 1523–1532. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1331>
- Asyhadie, Z. (2008). *Hukum kerja (hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja)*. Rajawali Pers.
- Baskara, A., & Dahlan, D. (2024). Pengaruh anggaran pendidikan terhadap human development index (HDI) di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 12(1), 17–23. [https://doi.org/10.25299/peka.2024.vol12\(1\).17564](https://doi.org/10.25299/peka.2024.vol12(1).17564)
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to education* (1st ed.). The University of Chicago Press.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>
- Daniel, P. A., Soleh, A., Kurniawan, H., & Firmansyah, D. (2021). Determinan kemiskinan di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(1), 40–51. <https://doi.org/10.53978/jd.v9i1.171>
- Darise, N. (2008). *Akuntansi keuangan daerah* (Cet.1). Indeks.
- Faizin, M. (2021). Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>

- Fajar, M., & Nurfalah, Z. (2020). Pemodelan determinan kemiskinan Wilayah Sumatera (pendekatan regresi panel). *Prosiding The 1st Sumatranomics, November.*
- Fretes, P. N. de. (2017). Pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33. <https://doi.org/10.29407/jae.v2i2.864>
- Gani, E. S. (2015). Sistem perlindungan upah di Indonesia. *Jurnal Tahkim*, 11(2), 127–143.
- Ghazali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariante dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi*. Universitas Diponegoro.
- Gunawan, R., Yarsah, W. N., & Arsyah, T. D. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 125–142.
- Hafifah, N., & Suherty, L. (2023). Pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat partisipasi angkatan kerja dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 848–857. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11066>
- Hakim, L., Ariestiningtyas, D. R., Mahalli, F. N., & Rizaldi, M. (2024). Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur: analisis dampak belanja pemerintah daerah pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta tingkat kemiskinan. *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 15(02), 507–517. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.76175>
- Halim, A., Rahayu, D., & Muzdalifah. (2022). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia (Studi Kasus Kab/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 12257–12268. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9311>
- Handoyo, U. D. P. (2023). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Journal of Nusantara Economic Science (JNES)*, 1(1), 19–23. <https://www.nafatimahpustaka.org/jnes/article/view/19/16>
- Hartanto, T., Idrus, J., & Virniasari. (2023). Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2022. *Transekonomika*, 3(1), 915–926. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i5.534>
- Hartono, D. (2022). Determinan pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio E-Kons*, 14(02), 155–164.

- <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i2.12088>
- Hauzan, A., Yulmardi, & Hardiani. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 211–222. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16496>
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 23(4), 122–137.
- Hidayat, W. N. R., & Perwithosuci, W. (2024). Analisis pengaruh PDRB Perkapita, upah minimum, penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 89–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.18551>
- Iswahyudi, & Asnawi, N. (2024). Menuju kebijakan sosial berorientasi kapabilitas: telaah pemikiran amartya sen dan martha nussbaum. *Multikultura*, 3(4), 666–679. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071>
- Kadir, R. D., & Ismail, J. (2020). Macroeconomic indicators and human development index in ten lowest medium in Indonesia: an islamic perspective. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(1), 339–347.
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 523–532.
- Kuncoro, M. (2018). *Metode kuantitatif* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mahendra, A. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, inflasi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 20(2), 174–186. <https://doi.org/10.54367/jmb.v20i2.1010>
- Mahfuzat, Hamid, A., Yunus, Nabila, S. V., & Dzunurain. (2024). Mandatory spending dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 5041–5050. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6889>
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 1–15. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/474>
- Murdaningsih, D., Retnowati, D., & Purnomo, S. D. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, belanja modal, tingkat partisipasi angkatan kerja dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

- Majalah Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 21(1), 109–121. <https://mimb.unwiku.ac.id/index.php/mimb/article/view/307>
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011–2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, (2015).
- Pratama, M. I., & Nursari, A. (2025). Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung : belanja pendidikan, belanja kesehatan , kemiskinan dan produk domestik regional bruto. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/10.36778/jesy.v8i1.1782>
- Putri, F. D. A., Suhendro, S., & Nauli, P. (2022). Analysis of factors affecting the level of the human development index. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 218–228. <https://doi.org/10.53402/ajebm.v1i3.229>
- Qoyum, A., Berakon, I., & Al-Hashfi, R. U. (2021). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis islam teori dan aplikasi* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>
- Rochaida, E. (2016). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 18(1), 14–24. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/42/40>
- Rosyadah, J. A. (2021). Determinan indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1080–1092. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.41076>
- Sangkereng, W., Engka, D. S. ., & Sumual, J. I. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 60–71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/26337>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Septriani. (2023). Analisis faktor determinasi indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 22(1), 83–92.

<https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5795>

- Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4), 212–221. <https://doi.org/10.24815/jimekp.v5i4.17087>
- Siahaan, T. W. (2014). Pengaruh modal manusia terhadap upah pekerja pada sektor jasa montir di Palembang. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(2), 189–208.
- Siregar, T. H., Lubis, F. A., & Inayah, N. (2023). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum regional (UMR) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam di Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(I), 1290–1303. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4368>
- Subair. (2015). Relevansi teori malthus dalam diskursus kependudukan kontemporer. *Dialektika*, 9(2), 96–110. <https://doi.org/10.33477/dj.v9i2.224>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 26). Alfabeta.
- Sukirno, S. (2003). *Makroekonomi teori pengantar* (Cet. 14). PT RajaGrafindo Persada.
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan*. Humaniora Utama Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan ekonomi* (10th ed.). Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (2003).
- UNDP. (2004). *Human development report: cultural liberty in today's diverse world*.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews*. UPP STIM YKPN.